

Prof. Dr. Samsul Wahidin S.H., M.H.

POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

		PERPUSTAKAAN	
NO. INV	142/mhk/19/c.1		
TD. Angg.	2019	Cat	C.1
PAMAT	<i>Sm</i>	TGL.	17/07/2019



PUSTAKA PELAJAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — vii

DAFTAR ISI — ix

BAB I

PENDAHULUAN — 1

BAB II

POLITIK HUKUM — 9

- a. Konsep Tentang Hukum — 9
- b. Hukum Sebagai Sumber Kekuasaan — 13
- c. Pemahaman Tentang Politik — 20
- d. Tentang Politik Hukum — 22
- e. Konsep Tentang Politik Hukum — 24

BAB III

PENEGAKAN HUKUM — 35

- A. Pemahaman — 35
- B. Tujuan Penegakan Hukum — 38
- C. Orientasi Penegakan Hukum — 51
- D. Penegak dan Penegakan Hukum Indonesia — 65

BAB IV

HUBUNGAN HUKUM POLITIK DAN POLITIK HUKUM — 71

1. Reorientasi — 71

2. Paparan Nonet dan Selznick — 75
3. Hukum Progresif — 84

BAB V

REPRESIVITAS POLITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA — 91

1. Reorientasi — 91
2. Perkembangan Berikut Lima Kasus — 93
3. Politik Hukum dan Hukum Politik — 101
4. Etika Penegakan Hukum — 107

BAB VI

PENUTUP — 115

DAFTAR PUSTAKA — 119

INDEKS — 123

LAMPIRAN — 135

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM — 137
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK — 156

RIWAYAT HIDUP — 177